



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dan acuan utama Perangkat Daerah dalam melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi kinerja, serta dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112));
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Magelang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
14. RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

29. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
31. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
33. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
34. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
35. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Renstra:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pertanian dan Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Salaman;
- aa. Kecamatan Borobudur;
- bb. Kecamatan Ngluwar;
- cc. Kecamatan Salam;
- dd. Kecamatan Srumbung;
- ee. Kecamatan Dukun;
- ff. Kecamatan Sawangan;
- gg. Kecamatan Muntilan;
- hh. Kecamatan Mungkid;
- ii. Kecamatan Mertoyudan;
- jj. Kecamatan Tempuran;

kk. Kecamatan Kajoran;
ll. Kecamatan Kaliangkrik;
mm. Kecamatan Bandongan;
nn. Kecamatan Candimulyo;
oo. Kecamatan Pakis;
pp. Kecamatan Ngablak;
qq. Kecamatan Grabag;
rr. Kecamatan Tegalrejo;
ss. Kecamatan Secang;
tt. Kecamatan Windusari; dan
uu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025 - 2029**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	25
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025- 2029	30
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	30
3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	32
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	35
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	111
BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Kaidah Pelaksanaan	115
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	116

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	7
Tabel 2.2	Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang..	11
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Golongan.....	11
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten magelang tahun 2019 – 2024	14
Tabel 2.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024	16
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18
Tabel 2.9	Simpulan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
Tabel 3.1	Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	24
Gambar 3.2	Konsep Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
Gambar 3.3	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	26
Tabel 3.4	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
Tabel 3.6	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	33
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029	54
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029	94
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029	95



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno – Hatta No. 6 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511 Telp. (0293) 788186,
Fax (0293) 88186 Website www.dpupr.magelangkab.go.id Email : dpupr@magelangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : David Rudiyanto, S.T., M.T.

NIP : 19680511 199803 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/25/KEP/22/2020 tanggal 28
Februari 2020

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang

Berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 6 Kota Mungkid Kabupaten
Magelang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota mungkid, 19 September 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



David Rudiyanto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2025 - 2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Magelang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
 20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 62);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah DPUPR dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan di DPUPR

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025 - 2029.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja.

1.4. Sistematikan Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan PD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD (SDM, aset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya, permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran tahun 2025 - 2029 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dan merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2025 – 2029, merumuskan indikator kinerja utama, indikator kinerja, definisi operasional, formulasi dan komponen pembentuk indikator program PD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

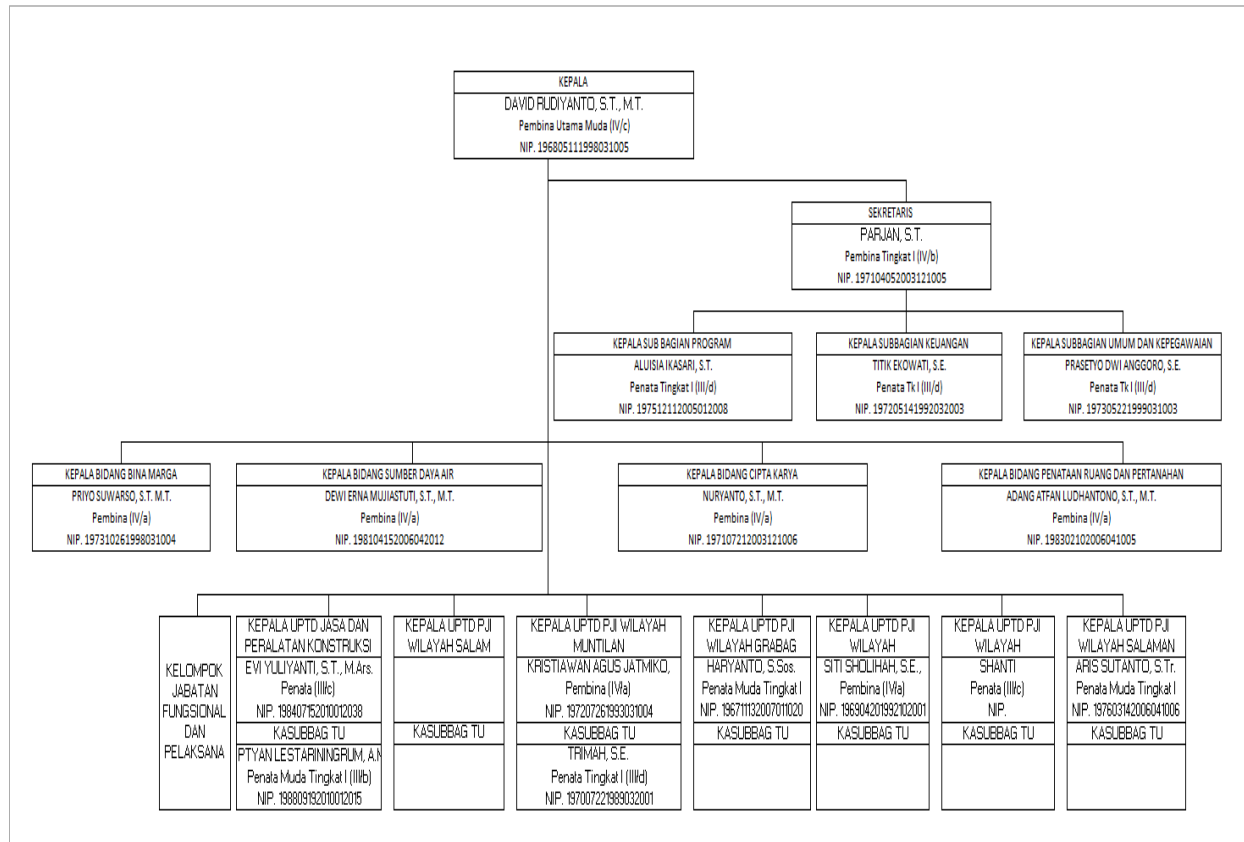
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bina marga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan sumber daya air;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penataan ruang dan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 1 Kepala UPTD Jasa dan Peralatan Konstruksi, 6 Kepala UPTD Wilayah, 6 Kepala Sub. Bagian UPTD Wilayah. Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Magelang

Uraian tugas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA BIDANG BINA MARGA

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, jalan, dan jembatan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air yang meliputi perumusan

konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya yang meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan Regional, Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemanfaatan tata ruang, perencanaan dan pengendalian tata ruang, pertanahan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, dan penataan ruang di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal, karena dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki Sumber Daya Manusia serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dan membangun program pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change*. Sumber Daya Manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*), keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of conduct*). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan

Sumber Daya Manusia menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan Sumber Daya Manusia secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar.

Memperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi Sumber Daya Manusia untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. Dengan kedudukan tersebut, Sumber Daya Manusia menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi Sumber Daya Manusia saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan Sumber Daya Manusia terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan Sumber Daya Manusia dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang akan semakin mudah.

Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S1 dan S2 (28,97%) D3 (11,03 %) dan lulusan SLTA (42,76%). Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S2)	10	6,90
2.	Sarjana (S1)	32	22,07
3.	Sarjana Muda (D3)	16	11,03
4.	SLTA	62	42,76
5.	SLTP	21	14,48
6.	SD	4	2,76
Jumlah		145	100,00

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2024

Sedangkan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 55,86%. Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	9	6,21
2.	Golongan III	81	55,86
3.	Golongan II	52	35,86
4.	Golongan I	3	2,07
JUMLAH		145	100,00

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2024

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang terdapat 123 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 9 pejabat struktural dan 114 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang yang terdiri dari 8 pejabat struktural dan 14 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Eselon	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	4	7	11
4.	Non Eselon	114	14	128
Jumlah		123	22	145

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2024

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin		
a	1) Mesin Gilas	16	Unit
	2) Wacker	1	Unit
	3) Pan Mixer	3	Unit
	4) Sprayer	5	Unit
	5) Mini Excavator	2	Unit
	6) Excavator Backhoe	1	Unit
	7) Backhoe Loader	1	Unit
	8) Vibro Roller	1	Unit
	9) Trailer/Fuso	1	Unit
	10)Mesin Potong Rumput	50	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana		Jumlah	Satuan
	b	Alat Angkutan		
		- Kendaraan Dinas Roda Empat	11	Unit
		- Kendaraan Dinas Roda Enam	7	Unit
		- Kendaraan Dinas Roda Tiga	6	Unit
		- Kendaraan dinas roda dua	82	Unit
	c	Alamat Kantor dan Rumah Tangga		
		- Komputer	33	
		- Laptop	64	Unit
		- Printer	47	Unit
		- Mesin Ketik	16	Unit
		- Meja	276	Unit
		- Kursi	370	Unit
		- Kursi Lipat	51	Unit
		- LCD Projector	8	Unit
		- Gps	20	Unit
		- Kamera	20	Unit
		- Drone	1	Unit
B		Bangunan dan Gedung		
	-	Bangunan Kantor	13	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang meliputi :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten magelang tahun 2019 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Cakupan Layanan Sumber Daya Air	persen	NA	75,65	76,11	77,43	78,76	NA	81,43	83,83	84,56	84,57	NA	107,64	110,14	109,21	107,38
2	Cakupan Layanan Air Minum***	persen	NA	89,91	91,03	92,15	93,27	NA	90,21	91,42	92,49	94,34	NA	100,33	100,43	100,37	101,15
3	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	persen	NA	0,00	0,00	50,00	100,00	NA	0,00	0,00	100,00	100,00	NA	0,00	0,00	200,00	100,00
4	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik***	persen	NA	88,73	89,76	90,79	91,82	NA	90,36	91,19	91,52	92,28	NA	101,84	101,59	100,80	100,50
5	Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	persen	NA	0,00	0,00	39,03	100,00	NA	0,00	0,00	5,37	100,00	NA	0,00	0,00	13,76	100,00
6	Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman	persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	0,00	100,00	100,00	100,00	NA	0,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	persen	NA	99,80	99,86	99,93	100,00	NA	99,17	99,65	99,96	100,07	NA	99,37	99,79	100,03	100,07
8	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	0,00	0,00	100,00	100	NA	0,00	0,00	100,00	100,00
9	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	persen	NA	82,69	82,93	83,21	83,48	NA	85,97	86,24	83,43	87,09	NA	103,97	103,99	100,26	104,32

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	persen	NA	84,88	89,92	94,96	100,00	NA	80,67	152,62	95,13	100	NA	95,04	169,73	100,18	100,00
11	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	NA	50,00	66,67	83,33	100,00	NA	47,97	87,50	87,50	100	NA	95,94	131,24	105,00	100,00
12	Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	65,00	100,00	80,00	100	NA	65,00	100,00	80,00	100,00

Tabel 2.7
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	17.738.097.145	19.972.978.782	19.906.088.415	23.071.834.500	NA	16.634.826.114	15.361.432.168	15.071.682.788	19.713.637.449	NA	93,78	76,91	75,71	85,44	9,39	7,09
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	NA	7.506.280.605	6.308.104.485	7.333.104.485	8.288.104.485	NA	6.605.048.936	7.451.066.526	6.510.382.625	6.368.764.703	NA	87,99	118,12	88,78	76,84	4,44	-0,66
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	NA	8.104.900.145	9.805.103.130	8.700.103.130	9.074.103.130	NA	8.091.466.855	13.968.234.177	12.348.567.151	17.256.938.498	NA	99,83	142,46	141,94	190,18	4,67	33,59
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	0	39.999.715	39.999.715	39.999.715	NA	0	42.285.795	3.299.351.884	1.626.703.760	NA	0,00	105,72	8248,44	4066,79	0,00	2550,60
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	NA	4.738.826.115	5.002.703.385	5.002.703.385	5.002.703.385	NA	4.737.231.164	5.489.073.984	7.190.659.394	10.300.699.677	NA	99,97	109,72	143,74	205,90	1,86	30,04

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	NA	0	0	0	500.000.000	NA	0	0	953.795.226	30.000.000	NA	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-32,28
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	NA	0	202.499.855	202.499.855	202.499.855	NA	0	146.853.271	67.480.415	-	NA	0,00	72,52	33,32	0,00	0,00	-51,35
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	NA	45.129.549.960	16.530.697.110	16.470.697.110	16.530.697.110	NA	44.923.955.850	5.235.251.836	17.464.904.140	16.575.416.460	NA	99,54	31,67	106,04	100,27	-21,12	46,72
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	NA	0	0	0	0	NA	0	5.114.414.559	2.442.669.212	623.341.560	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	NA	45.508.507.818	35.110.503.501	35.102.533.700	35.585.648.385	NA	41.003.683.275	85.291.319.104	72.716.925.842	94.858.518.677	NA	90,10	242,92	207,16	266,56	-7,16	41,24
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	NA	18.479.610	69.999.620	109.999.620	149.999.620	NA	18.459.610	172.490.115	186.114.250	378.818.693	NA	99,89	246,42	169,20	252,55	124,10	315,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	NA	221.245.760	272.998.735	292.998.735	292.998.735	NA	146.049.248	367.352.071	394.261.038	187.629.229	NA	66,01	134,56	134,56	64,04	10,24	35,48
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	NA	0	49.999.090	49.999.090	49.999.090	NA	0	36.373.304	61.238.803	41.369.104	NA	0,00	72,75	122,48	82,74	0,00	11,97

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah		128.965.887.158	93.365.587.408	93.210.727.240	98.788.588.010		122.160.721.052	138.676.146.910	138.708.032.768	167.961.837.810		94,72	148,53	148,81	170,02	2,27	11,54

d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah seluruh stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik pada Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya maupun Penataan Ruang dan Pertanahan. Stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholders tersebut berasal dari berbagai lini, yaitu Masyarakat, Swasta, Organisasi Non-Pemerintah, Akademisi, dan Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Permasalahan

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Belum optimalnya jaringan irigasi	a. Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah b. Masih rendahnya jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kelengkapan jaringan irigasi c. Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik d. Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik e. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi selain dari mata air dan sungai f. Rendahnya ketersediaan air irigasi pada musim kemarau g. Belum optimalnya konservasi sumber daya air h. Belum seluruh lahan sawah terakses air irigasi i. Masih terdapat konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			j. Belum optimalnya kelembagaan petani pengelola air irigasi
		2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan aman **	a. Belum tercapainya layanan air minum 100%
		3. Belum optimalnya layanan sanitasi aman	a. Belum tercapainya layanan sanitasi air limbah domestik 100% b. Belum optimalnya penanganan genangan Kawasan c. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai
		4. Belum optimalnya penataan bangunan gedung	a. Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai b. Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah c. Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
		5. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya	a. Masih rendahnya bangunan dan lingkungannya yang tertata
		6. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	a. Belum optimalnya penyediaan konektivitas jalan di pusat-pusat kegiatan b. Ketersediaan jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan c. Lebar jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten d. Kecepatan ruas jalan belum memenuhi standar kecepatan jalan kabupaten e. Masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari 5,5 m atau lebih rendah dari lebar jalan existing f. Kualitas dan ketahanan umur jalan masih rendah g. Kualitas dan ketahanan umur bangunan pelengkap jalan masih rendah
		7. Belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi	h. Masih rendahnya kompetensi tenaga terampil konstruksi i. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi
		8. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	a. Adanya dinamika regulasi penyelenggaraan penataan ruang b. Adanya kebutuhan pengembangan wilayah c. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang d. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			e. Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang
		9. Belum optimalnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Belum optimalnya fasilitasi pembebasan tanah

b. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari perangkat daerah dimasa mendatang, dimana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis ini merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah pada suatu saat, serta dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh perangkat daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.9
Simpulan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPUPR	PERMASALAHAN DPUPR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPUPR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPUPR			ISU STRATEGIS DPUPR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penanganan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanian	1. Belum optimalnya jaringan irigasi	Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial	SDG's yang berlaku hingga 2030	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan pangan	Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;	Belum optimalnya kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
	2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan aman	Peningkatan akses air bersih yang aman untuk semua		Peningkatan konektivitas jalan dan jembatan	Peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata,	
	3. Belum optimalnya layanan sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi yang memadai dan merata		Penyediaan akses sanitasi aman bagi 30% rumah tangga dan air minum perpipaan bagi 51,36% rumah tangga perkotaan	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan	
	4. Belum optimalnya penataan bangunan gedung	Pengelolaan dan perlindungan sumber daya air yang terpadu				
	5. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya					
	6. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan					
	7. Belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi					
	8. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang					
	9. Belum optimalnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2025-2029 adalah:

“Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera”.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut di atas mengandung lima kata kunci yaitu Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera yang disingkat “Anyar Gress”. Adapun makna dari kelima kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut :

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai Magelang Nyaman maka dalam lima tahun kedepan kami bertekad mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing. Pasangan calon Grengseng-Sahid berkeinginan agar masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Pemantapan

nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang sehat. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif.

Dalam lima tahun ke depan Pasangan Calon Grengseng-Sahid bertekad untuk mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi. Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM. Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip keadilan dan pemerataan harus diberlakukan untuk semua bidang pemangunan dan semua wilayah di Kabupaten Magelang.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2029, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam 5 misi utama (Panca Dharma) sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Tabel 3.1
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

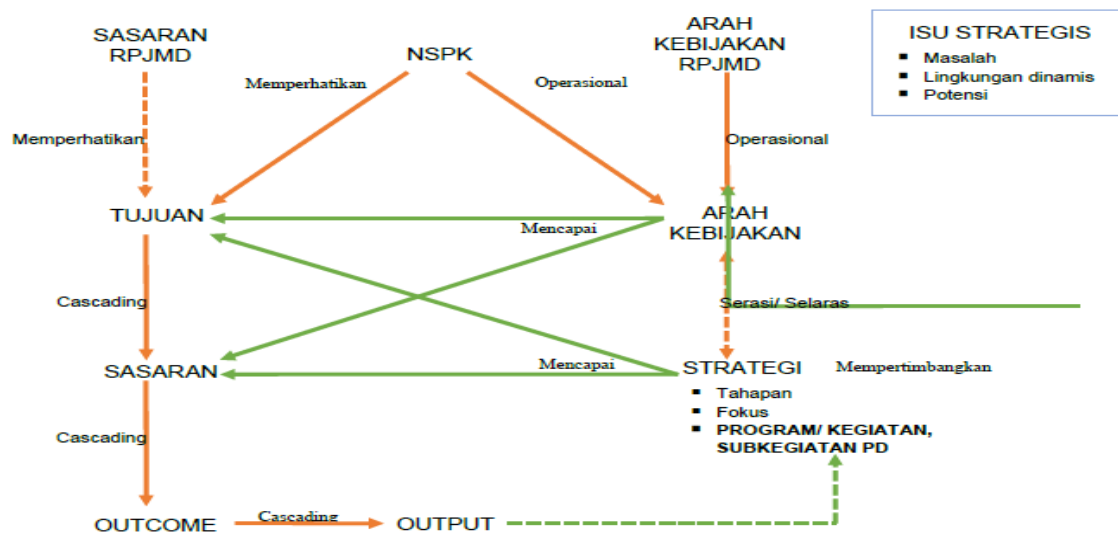
Visi : “Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Anyar Gress)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DPUPR	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	<p>Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan ;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga,</p>	Belum optimalnya kinerja layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	<p>1. Borobudur sebagai KSPN Pariwisata</p> <p>1. Banyaknya potensi dan Sumber daya mata air di Kabupaten Magelang</p> <p>2. Perda Bangunan Gedung</p> <p>3. Adanya kelembagaan masyarakat pada BPSAM dan BP Sanitasi</p> <p>4. UU Jasa Konstruksi Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi</p> <p>5. Adanya Pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem</p>	<p>1. Kendaraan tambang pasir batu dari merapi yang melebihi batas tonase maksimal</p> <p>2. Belum optimalnya peran kelembagaan pemanfaatan air</p> <p>3. Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah</p> <p>4. Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air</p> <p>5. Belum terbangunnya IPLT</p> <p>6. Terbatasnya lahan pembangunan IPAL</p> <p>7. Masih rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi</p> <p>8. Belum optimalnya standar pelayanan perijinan pemanfaatan tata ruang</p>

Visi : “Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Anyar Gress)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DPUPR	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>f. Pengendalian penyelenggaraa n tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;</p> <p>h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan; dan</p> <p>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>			

Untuk mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati tersebut perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan menjadi pedoman dalam penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan Sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas

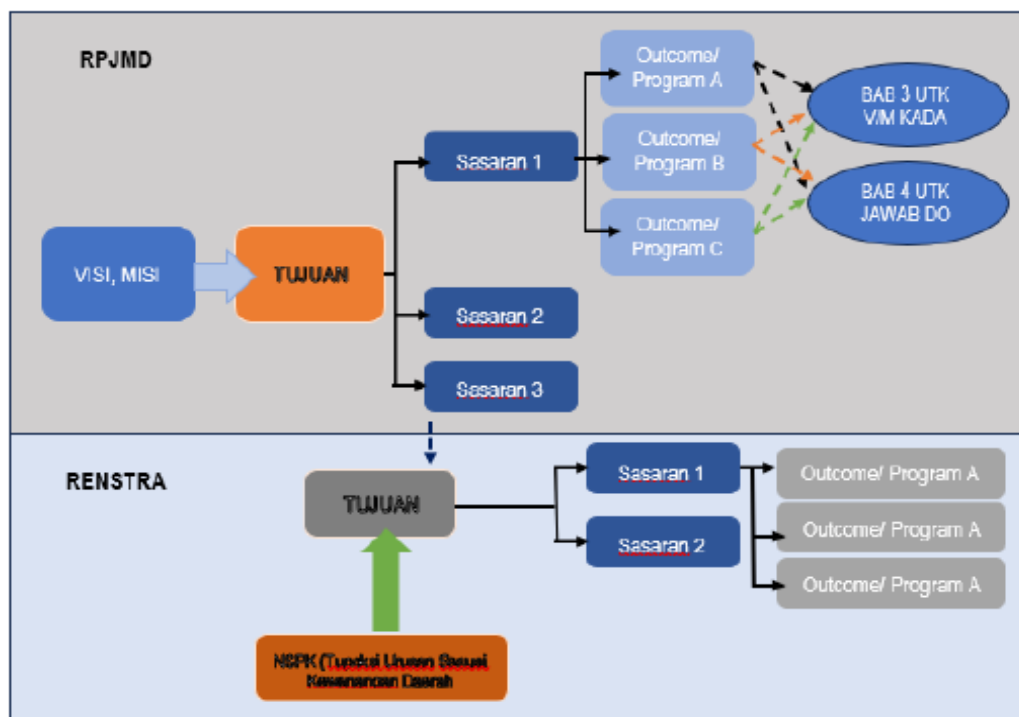
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, konsep Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Konsep Renstra



Gambar 3.3

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025- 2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Meningkatnya kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang adalah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Indikator tujuan Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 adalah Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan rumus perhitungannya adalah 70% Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + 30% Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Magelang adalah Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan dua indikator sasaran yaitu :

1. Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut :
{30% (Persentase Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota) + 35% ((Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan + Rumah tangga dengan akses sanitasi aman+ Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik + Persentase infrastuktur persampahan kondisi baik + Persentase penataan bangunan gedung)/5) + 35% Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota}
2. Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut :
35% Persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung + 30% Persentase layanan pengembangan jasa konstruksi + 35%Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang beserta dengan indikator kinerjanya. Rumusan tujuan dan sasaran SKPD beserta indikatornya disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar	T : Meningkatkan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		T : Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	78,24	79,10	79,96	80,82	81,69	82,55	
		S : Meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	S1 : Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	68,91	70,14	71,37	72,60	73,84	75,07	
			S2 : Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan dalam tahapan yang sesuai dengan tahapan RPJMD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan seperti pada tabel di 3.5 bawah ini.

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
<p>Penguatan Pondasi (memperkuat kualitas kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)</p>	<p>Konsolidasi Pondasi (meningkatkan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)</p>	<p>Akselerasi (mempercepat akselerasi peningkatan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)</p>	<p>Pemantapan (memantapkan peningkatan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)</p>	<p>Mewujudkan (mewujudkan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang optimal guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)</p>

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi

dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUPR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 3. Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA 5. PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan	Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air	
2.	1. Peraturan Pemerintah PP No. 16 Tahun 2005 tentang SPAM 2. Permen PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan SPAM 3. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman	Meningkatkan akses layanan air minum	
3.	Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman	Meningkatkan akses layanan sarana sanitasi air limbah domestik	
4.	Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan persampahan	Meningkatkan layanan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan	
5.	1. Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 3. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada	Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pemerintah dan publik	

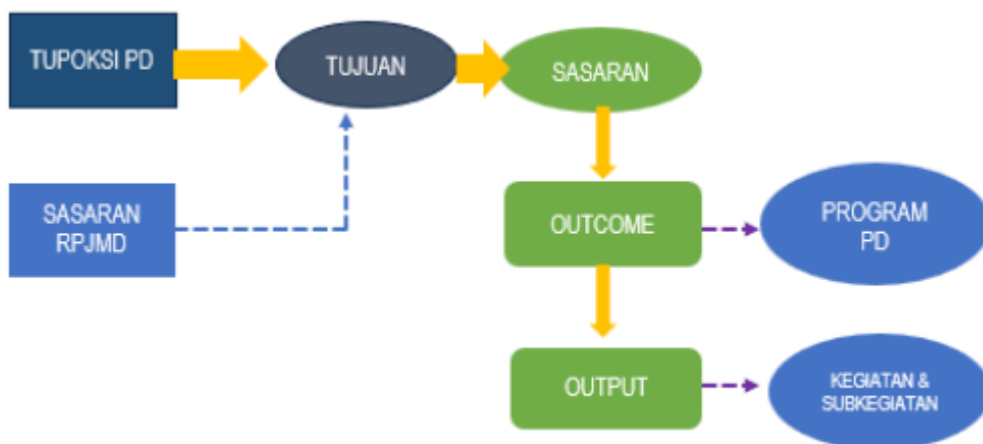
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUPR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Bangunan Gedung dan Lingkungan 4. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 5. Permen PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi 6. Permen PU No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung 7. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara			
6.	Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya	Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya	
7.	1. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 2. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	Meningkatkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap	1. Meningkatkan kondisi jalan 2. Meningkatkan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan 3. Meningkatkan ketersediaan jembatan yang sesuai standar kabupaten	
8.	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi 2. Meningkatkan layanan jasa konstruksi	
9.	1. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	1. Meningkatkan fasilitas pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan rekomendasi perijinan 3. Meningkatkan layanan pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	
		Meningkatkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah	Meningkatkan fasilitas pembebasan tanah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunannya mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2. Sedangkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif/pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatn ya kinerja layanan infrastrukt r dasar	T : Meningkatn ya kinerja infrastrukt r pekerjaan umum dan penataan ruang				T : Indeks kinerja infrastruktur pekerjaaan umum dan penataan ruang		
		S : Meningkatn ya pembangun an infrastrukt r pekerjaan umum dan penataan ruang			S1 : Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		
					S2 : Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
			OC 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		OC 1 : Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	PROG. 1 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				OT1.1 : Meningkatn ya akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air	OT1.1 : luas areal sawah yang teraliri irigasi	KEG.1.1 : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.1.1.1: Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
						SUBKEG. 1.1.2 : Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.. 1.1.3 : Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.1.1.4 : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
						SUBKEG. 1.1.5 : Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
						SUBKEG.1.1.6 : Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.1.1.7 : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
				OT1.2 : Meningkatn ya akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air	OT1.2 : panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	KEG.1.2 : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.1.2.1 : Pembangunan jaringan irigasi permukaan	
						SUBKEG.1.2.2 : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						SUBKEG.1.2.3 : Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.1.2.4 : Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	
			OC 2 : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		OC 2 : Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *	PROG. 2 : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				OT 2 : Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	OT 2 : panjang jalan kabupaten kondisi baik	KEG.2.1 : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.2.1.1 : Pengelolaan Leger Jalan	
						SUBKEG.2.1.2 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
						SUBKEG.2.1.3 : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
						SUBKEG.2.1.4 : Pembangunan Jalan	
						SUBKEG.2.1.5 : Rekonstruksi jalan	
						SUBKEG.2.1.6 : Pemeliharaan Berkala Jalan	
						SUBKEG.2.1.7 : Rehabilitasi jalan	
						SUBKEG.2.1.8 : Pemeliharaan Rutin Jalan	
						SUBKEG.2.1.9 : Penggantian Jembatan	
						SUBKEG.2.1.10 : Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.2.1.11 : Rehabilitasi Jembatan	
						SUBKEG.2.1.12 : Pembangunan Jembatan	
						SUBKEG.2.1.13 : Pemeliharaan Berkala Jembatan	
						SUBKEG.2.1.14 : Pelebaran Jembatan	
			OC 3 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		OC 3 : Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan *	PROG. 3 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				OT 3 : Meningkatn ya akses masyarakat yang terlayani air minum layak	OT 3 : Jumlah penduduk yang terlayani air minum	KEG.3.1 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.3.1.1 : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
						SUBKEG.3.1.2 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						SUBKEG.3.1.3 : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						SUBKEG.3.1.4 : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						SUBKEG.3.1.5 : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.3.1.6 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			OC 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		OC 4 : Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	PROG. 4 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				OT 4 : Meningkatn ya akses masyarakat yang terlayani sarana sanitasi air limbah domestik layak	OT 4 : Jumlah Penduduk yang terlayani akses sanitasi layak	KEG.4.1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.4.1.1 : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
						SUBKEG.4.1.2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
						SUBKEG.4.1.3 : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
						SUBKEG.4.1.4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
						SUBKEG.4.1.5 : Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.4.1.6 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						SUBKEG.4.1.7 : Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	
						SUBKEG.4.1.8 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						SUBKEG.4.1.9 : Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
			OC 5 : Meningkatnya kualitas sistem		OC 5 : Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik	PROG. 5 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
			drainase perkotaan			PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				OT 5 : Meningkatn ya pembangun an drainase perkotaan	OT 5 : Panjang drainase perkotaan yang dibangun/direhabili tasi	KEG.5.1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.5.1.1 : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
						SUBKEG.5.1.2 : Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
						SUBKEG.5.1.3 : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
						SUBKEG.5.1.4 : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.5.1.5 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
						SUBKEG.5.1.6 : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			OC 6 : Meningkatnya layanan persampahan		OC 6 : Persentase infrastruktur persampahan kondisi baik	PROG. 6 : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				OT 6 : Meningkatn ya pembangun an infrastrukt ur persampaha n	OT 6 : Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan ditingkatkan	KEG.6.1 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIAT AN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.6.1.1 : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	
						SUBKEG.6.1.2 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
						SUBKEG.6.1.3 : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	
						SUBKEG.6.1.4 : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	
			OC 7 : Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		OC 7 : Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	PROG. 7 : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
				OT 7 : Meningkatn ya Penataan bangunan dan lingkungann ya	OT 7 : Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	KEG.7.1 : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.7.1.1 : Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.7.1.2 : Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
			OC 8 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung		OC 8 : Persentase penataan bangunan gedung	PROG. 8 : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
				OT 8 : Meningkatn ya pembangun an gedung pemerintah dan publik	OT 8 : Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/direhabili tasi	KEG.8.1 : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
						SUBKEG.8.1.1 : Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.8.1.2 : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
					OC 8.2 : Persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung	SUBKEG.8.1.3 : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkatan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			OC 9 : Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		OC 9 : Persentase layanan pengembangan Jasa konstruksi	PROG. 9 : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
				OT 9.1 : Meningkatn ya jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih	OT 9.1 : Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	KEG.9.1 : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
						SUBKEG.9.1.1 : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
						SUBKEG.9.1.2 : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				OT 9.2 : Tersedianya dokumen HSPK dan Harga satuan	OT 9.2 : Jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan yang disediakan	KEG.9.2 : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG.9.2.1 : Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
			OC 10 : Meningkatnya kualitas penyelenggara an tata ruang		OC 10 : Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang	PROG. 10 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				OT 10.1 : Tersedianya dokumen perencanaaan n tata ruang	OT 10.1 : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	KEG.10.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.10.1.1 : Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
						SUBKEG.10.1.2 : Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				OT 10.2 : Meningkatn ya jumlah dokumen koordinasi	OT 10.2 : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	KEG.10.2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.10.2.1 : Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				OT 10.3 : Meningkatkan jumlah dokumen dan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota	OT 10.3 : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KEG.10.3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
						SUBKEG.10.3.1 : Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						pemanfaatan ruang dalam RTR	
			OC 11 : Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		OC 11 : Persentase layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan	PROG. 11 : PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				OT 11 : Meningkatn ya jumlah fasilitasi Penataguna an tanah	OT 11 : Jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	KEG.11.1 : Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
						SUBKEG.11.1.1 : Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7	8
						untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PEKERJA AN UMUM DAN PENATAA N RUANG	Indeks Kinerja Infrastruk tur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	79,10 %	81.984.3 36.497	79,96 %	71.791.0 30.173	80,82 %	96.275.5 17.195	81,69 %	110.212. 225.316	82,55 %	118.172. 733.049	
PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIN													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA													
Meningkat nya ketercapai an layanan perencana an, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawai an perangkat daerah	Tercapai ya layanan perencana aan, evaluasi kinerja, keuangan , layanan umum dan kepegawa ian perangkat daerah	100%	100%	19.949.9 27.207	100%	19.949.9 27.207	100%	19.949.9 27.207	100%	19.949.9 27.207	100%	19.949.9 27.207	
Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen perencana aan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	22 Doku men	43 dokum en	21.463.3 59	43 dokum en	21.463.3 59	43 dokum en	21.463.3 59	43 dokum en	21.463.3 59	43 dokum en	21.463.3 59	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9 Dokumen	5.859.171	9 Dokumen	5.859.171	9 Dokumen	5.859.171	10 Dokumen	5.859.171	9 Dokumen	5.859.171	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	22 laporan	7.611.642	22 laporan	7.611.642	22 laporan	7.611.642	22 laporan	7.611.642	22 laporan	7.611.642	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	7.992.546	12 laporan	7.992.546	12 laporan	7.992.546	12 laporan	7.992.546	12 laporan	7.992.546	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	10 dokumen laporan	15 laporan	18.161.194.533	15 laporan	18.161.194.533	15 laporan	18.161.194.533	15 laporan	18.161.194.533	15 laporan	18.161.194.533	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 orang / bulan	151 orang / bulan	17.849.894.231	151 orang / bulan	17.849.894.231	151 orang / bulan	17.849.894.231	151 orang / bulan	17.849.894.231	151 orang / bulan	17.849.894.231	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 dokumen	192.500.302	12 dokumen	192.500.302	12 dokumen	192.500.302	12 dokumen	192.500.302	12 dokumen	192.500.302	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaa n Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10 lapora n	37 Dokum en	118.800.0 00	37 Dokum en	118.800.0 00	37 Dokum en	118.800.0 00	37 Dokum en	118.800.0 00	37 Dokum en	118.800.0 00	
Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksan anya pelayana n administr asi umum	71,23 %	1 Layana n	30.400.0 00	1 Layana n	30.400.0 00	1 Layana n	30.400.0 00	1 Layana n	30.400.0 00	1 Layana n	30.400.0 00	
Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 lapora n	25 lapora n	30.400.00 0	25 lapora n	30.400.00 0	25 lapora n	30.400.00 0	25 lapora n	30.400.00 0	25 laporan	30.400.00 0	
Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Terlaksan anya pengadaa n barang milik daerah penunjan g urusan	100%	2 Paket	26.000.0 00	2 Paket	26.000.0 00	2 Paket	26.000.0 00	2 Paket	26.000.0 00	2 Paket	26.000.0 00	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pemerint ahan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	0 unit	10 unit	11.000.00 0	10 unit	11.000.00 0	10 unit	11.000.00 0	10 unit	11.000.00 0	10 unit	11.000.00 0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	150 unit	1 unit	15.000.00 0	1 unit	15.000.00 0	1 unit	15.000.00 0	1 unit	15.000.00 0	1 unit	15.000.00 0	
Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Tersedian ya layanan jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah	100%	2 Layan an	223.000. 000	2 Layan an	223.000. 000	2 Layan an	223.000. 000	2 Layan an	223.000. 000	2 Layana n	223.000. 000	
Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa	12 Lapor an	12 Lapora n	23.000.00 0	12 Lapora n	23.000.00 0	12 Lapora n	23.000.00 0	12 Lapora n	23.000.00 0	12 Lapora n	23.000.00 0	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Surat Menyurat												
Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	60 Lapor an	48 Lapora n	200.000.0 00	48 Lapora n	200.000.0 00	48 Lapora n	200.000.0 00	48 Lapora n	200.000.0 00	48 Lapora n	200.000.0 00	
Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Terlaksan anya pemelihar aan barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah	100%	214 unit	1.487.86 9.315	214 unit	1.487.86 9.315	214 unit	1.487.86 9.315	214 unit	1.487.86 9.315	214 unit	1.487.86 9.315	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 unit	97 unit	495.691.546	97 unit	495.691.546	97 unit	495.691.546	97 unit	495.691.546	97 unit	495.691.546	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	47 unit	47 unit	908.439.289	47 unit	908.439.289	47 unit	908.439.289	47 unit	908.439.289	47 unit	908.439.289	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 unit	2.486.400	5 unit	2.486.400	5 unit	2.486.400	5 unit	2.486.400	5 unit	2.486.400	
Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		62 unit	72.813.080	62 unit	72.813.080	62 unit	72.813.080	62 unit	72.813.080	62 unit	72.813.080	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara												
Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabil itasi	4 unit	3 unit	8.439.000	3 unit	8.439.000	3 unit	8.439.000	3 unit	8.439.000	3 unit	8.439.000	
PROGRAM PENGELO LAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
Meningkat nya akses masyaraka t terhadap irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenan gan Kabupate n/Kota*	59,19 %	63,67 %	5.704.43 2.599	64,65 %	5.704.43 2.599	65,63 %	5.704.43 2.599	66,62 %	7.704.43 2.599	67,60 %	9.704.43 2.599	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air	Luas areal sawah yang teraliri irigasi	2.448,60 ha	2.570,56 ha	619.806.212	2.644,43 ha	619.806.212	2.722,69 ha	619.806.212	2.803,33 ha	1.189.806.212	2.889,09 ha	1.189.806.212	-
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang	4 unit	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	8 unit	300.000.000	8 unit	300.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Direhabilitasi												
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	5.490.432	1 Lembaga	5.490.432	1 Lembaga	5.490.432	10 Lembaga	75.490.432	10 Lembaga	75.490.432	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,21 Km	0,125 KM	155.715.780	0,125 KM	155.715.780	0,125 KM	155.715.780	0,335 KM	305.715.780	0,335 KM	305.715.780	
Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 unit	1 unit	148.600.000	1 unit	148.600.000	1 unit	148.600.000	1 unit	148.600.000	1 unit	148.600.000	
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenanga	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenang	4 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	7 Dokumen	350.000.000	7 Dokumen	350.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n Kabupaten /Kota	an Kabupate n/Kota yang Disusun												
Pengemba ngan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya akses masyaraka t terhadap layanan	Panjang jaringan irigasi kewenang an	602.4 12,13 m	607.43 4,27 m	5.084.62 6.387	609.92 3,40 m	5.084.62 6.387	612.50 3,06 m	5.084.62 6.387	615.09 3,51 m	6.514.62 6.387	617.67 2,64 m	8.514.62 6.387	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
jaringan irigasi dan sumber daya air	kabupate n dalam kondisi baik												
Pembangu nan Jaringan Irigasi Permukaa n	Panjang Jaringan Irigasi Permukaa n yang Dibangun	0,10 Km	0,100 KM	299.750.0 00	0,100 KM	299.750.0 00	0,100 KM	299.750.0 00	0,800 KM	712.300.0 00	1,300 KM	1.212.300 .000	
Peningkata n Jaringan Irigasi Permukaa n	Panjang Jaringan Irigasi Permukaa n yang Ditingkatk an	0,15 Km	0,135 KM	148.250.0 00	0,135 KM	148.250.0 00	0,135 KM	148.250.0 00	0,7 KM	560.800.0 00	1,1 KM	1.060.800 .000	
Rehabilitas i Jaringan Irigasi Permukaa n	Panjang Jaringan Irigasi Permukaa n yang Direhabilit asi	2,88 Km	0,453 KM	3.241.526 .387	0,453 KM	3.241.526 .387	0,453 KM	3.241.526 .387	0,453 KM	3.241.526 .387	0,453 KM	3.241.526 .387	
Operasi dan Pemelihara an Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaa n yang Dioperasik	1,85 Km	1,392 KM	1.395.100 .000	1,392 KM	1.395.100 .000	1,392 KM	1.395.100 .000	1,995 KM	2.000.000 .000	2,993 KM	3.000.000 .000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Permukaan dan Dipelihara													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan *	17,10%	23,46%	16.724.367.872	28,56%	16.724.367.872	33,66%	16.724.367.872	38,77%	16.724.367.872	43,87%	16.724.367.872	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya akses masyaraka t yang terlayani air minum layak	Jumlah Penduduk yang terlayani air minum layak	1.269 .498	1.272. 593	16.724.3 67.872	1.290. 894	16.724.3 67.872	1.309. 195	16.724.3 67.872	1.327. 361	16.724.3 67.872	1.345. 662	16.724.3 67.872	
Pembangu nan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	NA	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	
Penyusuna n Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	NA	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) yang disusun												
Peningkata n Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatk an	30 Liter/ Detik	30 Liter/D etik	10.970.22 8.785	30 Liter/D etik	10.970.22 8.785	30 Liter/D etik	10.970.22 8.785	30 Liter/D etik	10.970.22 8.785	30 Liter/D etik	10.970.22 8.785	
Pembangu nan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	11 Liter/ Detik	11 Liter/D etik	3.325.223 .259	11 Liter/D etik	3.325.223 .259	11 Liter/D etik	3.325.223 .259	11 Liter/D etik	3.325.223 .259	11 Liter/D etik	3.325.223 .259	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perluasan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambunga n Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	520 SR	520 SR	2.413.915 .828	520 SR	2.413.915 .828	520 SR	2.413.915 .828	520 SR	2.413.915 .828	520 SR	2.413.915 .828	
Peningkata n Kapasitas Kelembaga an Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) yang ditingkatk an kapasitas nya	NA	1 Lemba ga	5.000.000	1 Lemba ga	5.000.000	1 Lemba ga	5.000.000	1 Lemba ga	5.000.000	1 Lembag a	5.000.000	
PROGRAM PENGEMB ANGAN SISTEM DAN													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PENGELO LAAN PERSAMP AHAN REGIONAL													
Meningkat nya layan an persampa han	Persentas e infrastruk tur persampa han kondisi baik	69,12 %	75,00 %	500.000. 000	77,94 %	500.000. 000	80,88 %	500.000. 000	83,82 %	500.000. 000	86,76 %	500.000. 000	
Pengemba ngan Sistem dan Pengelolaa n Persampa han di Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya pembangu nan infrastruk tur	Jumlah infrastruk tur persampa han yang dibangun dan	100 RT	1 unit	500.000. 000	1 unit	500.000. 000	1 unit	500.000. 000	1 unit	500.000. 000	1 unit	500.000. 000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
persampahan	ditingkatkan												
Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	NA	1 Ton/hari	5.000.000	1 Ton/hari	5.000.000	1 Ton/hari	5.000.000	1 Ton/hari	5.000.000	1 Ton/hari	5.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	NA	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	NA	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
/SPA/TPS- 3R/TPS	yang Disediaka n												
Pembangu nan TPA/TPST /SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST /SPA/TPS -3R/TPS yang dibangun	30 Ton / hari	5 Ton/h ari	485.000.0 00	5 Ton/h ari	485.000.0 00	5 Ton/h ari	485.000.0 00	5 Ton/h ari	485.000.0 00	5 Ton/ha ri	485.000.0 00	
PROGRAM PENGELO LAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
Meningkat nya akses masyaraka t terhadap sistem pengelolaa n air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	1,51 %	6,90%	9.684.80 7.912	11,11 %	9.684.80 7.912	15,32 %	9.684.80 7.912	19,52 %	9.684.80 7.912	23,73 %	11.684.8 07.912	
Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Air													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya akses masyaraka t yang terlayani sarana sanitasi air limbah domestik layak	Jumlah Penduduk yang terlayani akses sanitasi layak	NA	1.225. 503 orang	9.684.80 7.912	1.276. 495 orang	9.684.80 7.912	1.300. 582 orang	9.684.80 7.912	1.323. 189 orang	9.684.80 7.912	1.345. 662 oranga	11.684.8 07.912	
Pembangu nan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukim an	Kapasitas Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukim an yang Dibangun	NA	144 m3/ha ri	5.000.000	144 m3/ha ri	5.000.000	144 m3/ha ri	5.000.000	144 m3/ha ri	5.000.000	144 m3/har i	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangu nan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukim an Berbasis Masyaraka t	Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukim an Berbasis Masyarak at yang Dibangun	144 M ³ /H ari	144 M ³ /Ha ri	2.302.143 .550	144 M ³ /Ha ri	2.302.143 .550	144 M ³ /Ha ri	2.302.143 .550	144 M ³ /Ha ri	2.302.143 .550	144 M ³ /Har i	2.302.143 .550	
Penyediaa n Jasa Penyedota n Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedota n Lumpur Tinja	NA	100 RT	5.000.000	100 RT	5.000.000	100 RT	5.000.000	100 RT	5.000.000	100 RT	5.000.000	
Pembangu nan Instalasi Pengolaha n Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolaha n Lumpur Tinja (IPLT) Terbangu n	0 m3 / hari	100 m3/ha ri	5.000.000	100 m3/ha ri	5.000.000	100 m3/ha ri	5.000.000	100 m3/ha ri	5.000.000	100 m3/har i	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	NA	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	505.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	NA	150 orang	5.000.000	150 orang	5.000.000	150 orang	5.000.000	150 orang	5.000.000	150 orang	5.000.000	
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual	NA	650 Rumah Tangga	6.999.666.258	650 Rumah Tangga	6.999.666.258	650 Rumah Tangga	6.999.666.258	650 Rumah Tangga	6.999.666.258	650 Rumah Tangga	8.499.666.258	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/esuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob												
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan	0 Dokumen	1 Dokumen	347.998.104	1 Dokumen	347.998.104	1 Dokumen	347.998.104	1 Dokumen	347.998.104	1 Dokumen	347.998.104	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun												
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	650 RT	500 RT	10.000.000	500 Rumah Tangga	10.000.000	500 Rumah Tangga	10.000.000	500 Rumah Tangga	10.000.000	500 Rumah Tangga	10.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
Meningkatnya kualitas sistem	Persentase drainase jalan	76,98%	78,06%	405.000.000	78,61%	405.000.000	79,15%	405.000.000	79,69%	405.000.000	80,23%	405.000.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
drainase perkotaan	kabupate n kondisi baik												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya pembangu nan drainase perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang dibangun /direhabil itasi	140 M	15 M	405.000. 000	15 M	405.000. 000	15 M	405.000. 000	15 M	405.000. 000	15 M	405.000. 000	
Peningkata n Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang	0 Siste m Drain ase	1 Sistem Draina se	75.000.00 0	1 Sistem Draina se	75.000.00 0	1 Sistem Draina se	75.000.00 0	1 Sistem Draina se	75.000.00 0	1 Sistem Drainas e	75.000.00 0	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ditingkatk an	Perko taan	Perkot aan		Perkot aan		Perkot aan		Perkot aan		Perkota an		
Penyediaa n Sarana Pendukun g Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukun g Sistem Drainase Perkotaan yang Disediaka n	NA	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	
Rehabilitas i Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilit asi	0 Siste m Drain ase Perko taan	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Drainas e Perkota an	75.000.00 0	
Penyusuna n Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0 Doku men	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	yang disusun												
Pembangu nan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Siste m Drain ase Perko taan	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Drainas e Perkota an	75.000.00 0	
Operasi dan Pemelihara an Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihar a	0 Siste m Drain ase Perko taan	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Draina se Perkot aan	75.000.00 0	1 Sistem Drainas e Perkota an	75.000.00 0	
PROGRAM PENATAA N BANGUNA N GEDUNG													
Meningkat nya kualitas	1. Persentas e penataan	88,12 %	88,84 %	4.631.47 7.509	89,20 %	4.631.47 7.509	89,56 %	9.431.47 7.509	89,92 %	9.431.47 7.509	90,28 %	9.431.47 7.509	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
bangunan gedung	bangunan gedung												
	2. Persentas e layanan perizinan dalam pembang unan dan pemanfaa tan bangunan gedung	100,0 0%	100,00 %	204.339. 204	100,00 %	204.339. 204	100,00 %	404.339. 204	100,00 %	404.339. 204	100,00 %	404.339. 204	
Penyeleng garaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirika n Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bangunan Gedung													
Meningkat nya pembangu nan gedung pemerinta h dan publik	Jumlah bangunan gedung pemerint ah dan publik yang dibangun /direhabil itasi	11 Bang unan Gedu ng	3 Bang unan Gedun g	4.835.81 6.713	3 Bang unan Gedun g	4.835.81 6.713	3 Bang unan Gedun g	9.835.81 6.713	3 Bang unan Gedun g	9.835.81 6.713	3 Bang unan Gedun g	9.835.81 6.713	
Pemelihara an, Perawatan, dan Pemeriksa an Berkala Bangunan Gedung untuk Kepenting an Strategis Kabupate n/Kota yang Dipelihara , Dirawat, dan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepenting an Strategis Kabupate n/Kota yang Dipelihara , Dirawat, dan	11 Bang unan Gedu ng	3 Bang unan Gedun g	500.000.0 00	3 Bang unan Gedun g	500.000.0 00	3 Bang unan Gedun g	2.900.000 .000	3 Bang unan Gedun g	2.900.000 .000	3 Bang unan Gedun g	2.900.000 .000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Diperiksa Berkala												
Pembangu nan, Pemanfaat an, Pelestariaa n dan Pembongk aran Bangunan Gedung untuk Kepentinga n Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pembangu nan, Pemanfaat an, Pelestaria an dan Pembongk aran Bangunan Gedung untuk Kepenting an Strategis Daerah Kabupate n/Kota	1 doku men	1 dokum en	4.131.477 .509	1 dokum en	4.131.477 .509	1 dokum en	6.531.477 .509	1 dokum en	6.531.477 .509	1 dokum en	6.531.477 .509	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyeleng araan Penerbitan Persetujua n Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilika n Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongk atan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	Jumlah Penerbita n Persetujua n Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilik an Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongk atan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	340 doku men	100 dokum en	204.339. 204	100 dokum en	204.339.2 04	100 dokum en	404.339.2 04	100 dokum en	404.339.2 04	100 dokum en	404.339.2 04	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
PROGRAM PENATAA N BANGUNA N DAN LINGKUN GANNYA													
Meningkat nya bangunan dan lingkunga n yang tertata	Persentas e penataan bangunan dan lingkunga nnya	100%	100%	295.300. 687	100%	295.300. 687	100%	295.300. 687	100%	295.300. 687	100%	295.300. 687	
Penyeleng garaan Penataan Bangunan dan Lingkunga nnya di Daerah													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kabupaten /Kota													
Meningkatnya Penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan	1 Kawasan	295.300.687	1 Kawasan	295.300.687	1 Kawasan	295.300.687	1 Kawasan	295.300.687	1 Kawasan	295.300.687	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota		1 Dokumen	25.323.846	1 Dokumen	25.323.846	1 Dokumen	25.323.846	1 Dokumen	25.323.846	1 Dokumen	25.323.846	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	0 Orang	100 Orang	269.976.841	100 Orang	269.976.841	100 Orang	269.976.841	100 Orang	269.976.841	100 Orang	269.976.841	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *	89,20 %	91,38 %	23.253.832.574	91,43 %	13.060.526.250	91,47 %	32.545.013.272	91,52 %	44.481.721.393	91,57 %	48.442.229.126	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyeleng garaan Jalan Kabupaten /Kota													
Meningkat nya jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupate n kondisi baik	NA	656,69 km	23.253.8 32.574	659,45 km	13.060.5 26.250	662,20 km	32.545.0 13.272	664,96 km	44.481.7 21.393	667,72 km	48.442.2 29.126	
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	NA	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000.0 00	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	4 Dokum en	3 Dokum en	299.989.4 01	3 Dokum en	299.989.4 01	3 Dokum en	299.989.4 01	3 Dokum en	299.989.4 01	3 Dokum en	299.989.4 01	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jalan dan Jembatan	Penyeleng garaan Jalan dan Jembatan yang Disusun												
Survey Kondisi Jalan/Jem batan	Panjang Jalan/Je mbatan yang Disurvey Kondisiny a	201 Km	190 KM	98.950.00 0	190 KM	98.950.00 0	190 KM	98.950.00 0	190 KM	98.950.00 0	190 KM	98.950.00 0	
Pembangu nan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasa n	NA	0,5 km	500.000.0 00	0,5 km	500.000.0 00	0,5 km	500.000.0 00	0,5 km	500.000.0 00	0,5 km	500.000.0 00	
Rekonstru ksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstr uksi	45,16 Km	5 KM	7.257.430 .389	5 KM	2.257.430 .389	6,5 KM	3.007.430 .389	12 KM	14.944.13 8.510	15 KM	18.095.97 1.553	
Pemelihara an Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	1 Km	0,5 KM	748.425.0 00	0,5 KM	748.425.0 00	1 KM	1.998.425 .000	1 KM	1.998.425 .000	0,5 KM	1.998.425 .000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Secara Berkala												
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	21,12 Km	0,5 KM	882.900.000	0,5 KM	882.900.000	1,5 KM	2.082.900.000	1,5 KM	2.082.900.000	0,5 KM	2.082.900.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	126,86 Km	30 KM	10.292.708.413	30 KM	5.099.402.089	75 KM	15.583.889.111	75 KM	15.583.889.111	30 KM	16.392.563.801	
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	NA	15 M	500.000.000	15 M	500.000.000	15 M	2.000.000.000	15 M	2.000.000.000	15 M	2.000.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	150 Jembatan	150 Jembatan	750.319.371	150 Jembatan	750.319.371	150 Jembatan	1.000.319.371	150 Jembatan	1.000.319.371	150 Jembatan	1.000.319.371	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	NA	1 m	753.950.000	1 m	753.950.000	10 m	1.503.950.000	10 m	1.503.950.000	10 m	1.503.950.000	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangu nan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	NA	15 M	500.000.0 00	15 M	500.000.0 00	15 M	2.000.000 .000	15 M	2.000.000 .000	15 M	2.000.000 .000	
Pemelihara an Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	NA	15 M	119.160.0 00	15 M	119.160.0 00	15 M	869.160.0 00	15 M	869.160.0 00	15 M	869.160.0 00	
Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilebarka n	NA	15 M	500.000.0 00	15 M	500.000.0 00	15 M	1.500.000 .000	15 M	1.500.000 .000	15 M	1.500.000 .000	
PROGRAM PENGEMB ANGAN JASA KONSTRU KSI													
Meningkat nya kompeten si tenaga konstruks i	Persentas e layanan pengemban gan Jasa konstruks i	100,0 0%	100%	136.526. 500	100%	136.526. 500	100%	136.526. 500	100%	136.526. 500	100%	136.526. 500	
Penyeleng garaan Pelatihan													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tenaga Terampil Konstruks i													
Meningkat nya jumlah tenaga terampil konstruks i yang terlatih	Jumlah tenaga terampil konstruks i yang dilatih	260 orang	30 orang	62.097.5 00	30 orang	62.097.5 00	30 orang	62.097.5 00	30 orang	62.097.5 00	30 orang	62.097.5 00	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruks i Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	160 orang	50 orang	44.797.50 0	50 orang	44.797.50 0	50 orang	44.797.50 0	50 orang	44.797.50 0	50 orang	44.797.50 0	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruks	260 orang	30 orang	17.300.00 0	30 orang	17.300.00 0	30 orang	17.300.00 0	30 orang	17.300.00 0	30 orang	17.300.00 0	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	i Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih												
Penyeleng garaan Sistem Informasi Jasa Konstruks i Cakupan Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan	Jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan yabg disediaka n	2 Doku men	2 Doku men	74.429.0 00	2 Doku men	74.429.0 00	2 Doku men	74.429.0 00	2 Doku men	74.429.0 00	2 Dokum en	74.429.0 00	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	74.429.000	2 dokumen	74.429.000	2 dokumen	74.429.000	2 dokumen	74.429.000	2 dokumen	74.429.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	100,00%	494.324.433	100,00%	494.324.433	100,00%	494.324.433	100,00%	494.324.433	100,00%	494.324.433	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya jumlah dokumen perencana an tata ruang	Jumlah dokumen perencana an tata ruang	1 doku men	1 dokum en	350.000. 000	1 dokum en	350.000. 000	1 dokum en	350.000. 000	1 dokum en	350.000. 000	1 dokum en	350.000. 000	
Penyusuna n RDTR Kabupaten /Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkad a RDTR Kabupate n/Kota	0 doku men	1 dokum en	350.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	
Penyusuna n RTRW Kabupaten /Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupate n/Kota	1 doku men	0 dokum en	0	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	1 dokum en	175.000.0 00	
Koordinas i dan Sinkronisa si Pemanfaat an Ruang													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Kab/Kota													
Meningkat nya jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisa si pemanfaat an ruang daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordina si dan Sinkronis asi Pemanfaa tan Ruang Daerah Kabupate n/Kota	1 doku men	1 dokum en	67.999.9 07	1 dokum en	67.999.9 07	1 dokum en	67.999.9 07	1 dokum en	67.999.9 07	1 dokum en	67.999.9 07	
Koordinasi Penyelengg araan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyeleng garaan penataan ruang	1 doku men	1 dokum en	67.999.90 7	1 dokum en	67.999.90 7	1 dokum en	67.999.90 7	1 dokum en	67.999.90 7	1 dokum en	67.999.90 7	
Koordinas i dan Sinkronisa si Pengendal ian Pemanfaat an Ruang													

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Kab/Kota													
Meningkat nya jumlah dokumen dan koordinasi pengendal ian pemanfaat an ruang daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordina si dan Sinkronis asi Pengenda lian Pemanfaat an Ruang Daerah Kabupate n/Kota	1 doku men	1 dokum en	76.324.5 26	1 dokum en	76.324.5 26	1 dokum en	76.324.5 26	1 dokum en	76.324.5 26	1 dokum en	76.324.5 26	
Pengenaan Sanksi Administra tif terhadap pelanggara n pemanfaat an ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administra tif	1 doku men	1 kasus	76.324.52 6	1 kasus	76.324.52 6	1 kasus	76.324.52 6	1 kasus	76.324.52 6	1 kasus	76.324.52 6	
URUSAN PEMERIN TAHAN		100%	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIDANG PERTANA HAN													
PROGRAM PENYELES AIAN GANTI KERUGIA N DAN SANTUNA N TANAH UNTUK PEMBANG UNAN													
Meningkat nya Penyelesai an Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangu nan	Persentas e layanan fasilitasi penyelesa ian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembang unan	100%	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	100%	49.473.7 17	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelesai an Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangu nan oleh Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota													
Meningkat nya jumlah fasilitasi Penatagun aan tanah	jumlah fasilitasi penatagu naan tanah	20 doku men	1 dokum en	49.473.7 17	1 dokum en	49.473.7 17	1 dokum en	49.473.7 17	1 dokum en	49.473.7 17	1 dokum en	49.473.7 17	
Koordinasi dan Sinkronisa si Penyelesai an Masalah Ganti Kerugian dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronis asi Penyelesai an Masalah Ganti	20 doku men	1 dokum en	49.473.71 7	1 dokum en	49.473.71 7	1 dokum en	49.473.71 7	1 dokum en	49.473.71 7	1 dokum en	49.473.71 7	

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Base line 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterang an
			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Santunan Tanah untuk Pembangu nan oleh Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangu nan oleh Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota												
Jumlah				82.033.8 10.214		71.840.5 03.890		96.324.9 90.912		110.261. 699.033		118.222. 206.766	

Dalam rangka pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung 3 (tiga) Program Sapta Cipta yaitu :

1. Sapta Cipta ke-3 “Makmur Rakyat” (misi 3&4)

Dari 6 (enam) program yang ada pada Sapta Cipta ke-3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

- Program Sabuk Gunung Magelang
- Program Rekonstruksi Jalan Tambang
- Program Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM)

2. Sapta Cipta ke-4 “Gemilang Potensine” (misi 3)

Dari 9 (sembilan) program yang ada pada Sapta Cipta ke-4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung 1 (satu) program yaitu Program Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif.

3. Sapta Cipta ke-7 “Lestari Alam” (misi 5)

Dari 4 (empat) program yang ada pada Sapta Cipta ke-7, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung 1 (satu) program yaitu Program Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Air.

Program Unggulan (Sapta Cipta) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sapta Cipta ke-3 : Makmur Rakyat (Misi 3 dan 4)			
1.1	Program Sabuk Gunung			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan FS Jalur Sabuk Gunung
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan pada jalur sabuk gunung
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
			Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	
1.2	Program Jalur Tambang		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan FS Jalur Tambang
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan pada jalur tambang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
			Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.3	Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM)			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	<p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p>	penyusunan DED dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada daerah rawan kekeringan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	<p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p>	penyusunan DED, pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik, pembangunan IPLT

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Sapta Cipta ke-4 “Gemilang Potensine” (misi 3)			
	Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	penyusunan DED, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
3.	Sapta Cipta ke-7 ‘Lestari Alame’ (misi 5)			
	Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Air			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	penyusunan DED, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang mendukung konservasi mata air dan sungai

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
			Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan indikator tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025 - 2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun
2025 - 2029

N O	INDIKATO R	SATUA N	TARGET TAHUN						KET
			202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	indeks	78,2 4	79,1 0	79,9 6	80,8 2	81,6 9	82,5 5	TUJUAN PD
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	indeks	68,9 1	70,1 4	71,3 7	72,6 0	73,8 4	75,0 7	SASARAN PD
3	Indeks Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	indeks	100	100	100	100	100	100	SASARAN PD

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun
2025 - 2029

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *	59,19	62,69	63,67	64,65	65,63	66,62	67,60	67,60
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**	17,10	18,36	23,46	28,56	33,66	38,77	43,87	43,87
3	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman**	1,51	2,69	6,90	11,11	15,32	19,52	23,73	23,73
4	Persentase penataan bangunan gedung	88,12	88,48	88,84	89,20	89,56	89,92	90,28	90,28
5	Tingkat kemantapan jalan	89,198	91,33	91,38	91,43	91,47	91,52	91,57	91,57
6	Persentase layanan pengembangan Jasa konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	6,87	6,90	6,94	6,97	7,01	7,04	7,08	7,08
10	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	94,33	95,27	96,23	97,19	98,16	99,14	100	100

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten								
11	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,33	95,27	96,23	97,19	98,16	99,14	100	100
12	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	29,75	41,46	53,17	64,88	76,58	88,29	100,00	100,00
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pekerjaan umum jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

1. Memprioritaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 - 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen

- perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi renja sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 benar-benar dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkesinambungan dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 19 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

LAMPIRAN

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

Lampiran 1 : Cascading Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	"Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera " atau Magelang Anyar Gress	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(70% Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur dasar +—30% Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman)	Indeks kinerja pembangunan infrastruktur wilayah merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kinerja layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perumahan dan permukiman	Belum optimalnya layanan infrastruktur Dasar

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pertanahan								

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar	(60%—Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + 40%—Indeks Kinerja Infrastruktur Perhubungan yang berkeselamatan)	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar merupakan peningkatan kinerja layanan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur dasar pekerjaan umum dan penataan ruang serta infrastruktur dasar Perhubungan	1. Meningkatkan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan	1. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi	Belum optimalnya kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatnya kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					2. Meningkatkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap			

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman			

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					4. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman			

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					5. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya			
					6. Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung			

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					7. Meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien			
				2. Meningkatkan penataan ruang wilayah	8. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang			

Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					sesuai dengan rencana tata ruang wilayah			
				3. Meningkatkan administrasi kepemilikan tanah	9. Meningkatkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah			

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23
70% Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + 30% Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan persentase peningkatan kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dan layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23
				<p>2. Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang</p>

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD
19	20	21	22	23

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
<p>{30% (Persentase Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) + 35% ((Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan + Rumah tangga dengan akses sanitasi aman+ Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik + Persentase infrastuktur persampahan kondisi baik + Persentase penataan bangunan gedung)/5) + 35% Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota}</p>	<p>Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air minum, air limbah domestik, bangunan-gedung</p>	<p>1. Belum optimalnya jaringan irigasi</p>	<p>1. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi</p>	<p>1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p>

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		2. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	2. Meningkatkan penyelenggaraan jalan	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		<p>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan aman</p>	<p>3. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum</p>	<p>3. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p>

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		4. Belum optimalnya layanan sanitasi layak dan aman	4. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi	4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
				<p data-bbox="1991 574 2285 695">5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</p> <p data-bbox="1991 1208 2285 1385">6. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</p>

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		5. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya	5. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya	7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		6. Belum optimalnya penataan bangunan gedung	6. Meningkatkan penataan bangunan gedung	8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
<p>35% Persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung + 30% Persentase layanan pengembangan jasa konstruksi + 35%Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>indikator yang menggambarkan tingkat layanan pada urusan pekerjaan umum dan penatan ruang yang meliputi layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, layanan pengembangan jasa konstruksi, dan layanan penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>7. belum optimalnya layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung</p> <p>8. Belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi</p>	<p>7. meningkatkan layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung</p> <p>8. Meningkatkan jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih dan disertifikasi</p>	<p>9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</p>

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		<p>9. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>9. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah</p>	<p>10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p>
		<p>10. Belum optimalnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan</p>	<p>10. Meningkatkan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan</p>	<p>11. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN</p>

Formula Indikator Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program
24	25	26	27	28
		Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Tanah Untuk Pembangunan	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut: 1. Aspek Kondisi Prasarana Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) Total nilai semua aspek maksimal 100	<ol style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/ sawah Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik Belum optimalnya kelembagaan petani pengelola air irigasi Masih terdapat konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
			<p>5. Belum optimalnya konservasi sumber daya air</p> <p>6. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi selain dari mata air dan sungai</p> <p>7. Rendahnya ketersediaan air irigasi pada musim kemarau</p> <p>8. Belum seluruh lahan sawah terakses air irigasi</p> <p>9. Masih rendahnya jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kelengkapan jaringan irigasi</p>
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *	Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota) = (Panjang jalan kabupaten/kota yang dijaga dalam kondisi	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
	-	$\frac{\text{permukaan mantap / total panjang jalan kabupaten/kota}}{x} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan kabupaten/kota kondisi mantap = Panjang jalan kabupaten/kota kondisi baik + panjang jalan kabupaten/kota sedang (dalam km); - Total panjang jalan kabupaten/kota dalam km 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mantapnya kondisi jalan kabupaten 2. Belum optimalnya penyediaan konektivitas jalan di pusat-pusat kegiatan 3. Lebar jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten 4. Kecepatan ruas jalan belum memenuhi standar kecepatan jalan kabupaten 5. jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan 6. Kualitas dan ketahanan umur jalan dan bangunan pelengkap jalan masih rendah 7. Masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari 5,5 m atau lebih rendah dari lebar jalan existing
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan *	<p>Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100%</p> <p>- PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum</p>	Belum tercapainya layanan air minum 100%

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
		<p>perpipaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) - JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM 	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	<p>Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : $PSA = \frac{((JRTST+JRTIPLT) : JRTS) \times 100\%}{1}$</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman - JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T 	Belum tercapainya layanan sanitasi air limbah domestik 100%

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
		<ul style="list-style-type: none"> - JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) - JRSTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya 	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik	(panjang drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik / panjang drainase jalan kabupaten x 100%)	Belum optimalnya penanganan genangan kawasan
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase infrastruktur persampahan kondisi baik	(Persentase jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sarana prasarana persampahan kondisi baik/jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sarana prasarana persampahan) x 100%	Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	(realisasi Jumlah penataan bangunan dan lingkungannya pada tahun n/target jumlah rencana penataan bangunan dan lingkungannya pada tahun n)x100%)	Masih rendahnya bangunan dan lingkungannya yang tertata -
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1. Persentase penataan bangunan gedung	persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik = jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik/jumlah seluruh gedung pemerintah x100%)	1. Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah 2. Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
	2. Persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung	(Realisasi Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG)/target Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG)) x 100%	3. Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase layanan pengembangan Jasa konstruksi -	((Jumlah peserta pelatihan + jumlah fasilitasi sertifikasi)/(target jumlah peserta pelatihan+target jumlah fasilitasi sertifikasi) x 100 %	1. Masih rendahnya kompetensi tenaga terampil konstruksi 2. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang	(Persentase ketersediaan dokumen tata ruang yang telah ditetapkan + persentase dokumen rekomendasi perijinan + persentase kesesuaian tata ruang)/3	1. Dinamika regulasi penyelenggaraan penataan ruang; 2. Kebutuhan pengembangan wilayah

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD
29	30	31	32
			<p>1. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang;</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang</p>
			Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan	$\left\{ \left(\frac{\text{realisasi Fasilitasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum tahun } n}{\text{target Fasilitasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum tahun } n} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{realisasi Peningkatan Bidang Tanah Terdaftar tahun } n}{\text{target Peningkatan Bidang Tanah Terdaftar tahun } n} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{realisasi pelaksanaan reforma agraria tahun } n}{\text{target Peningkatan Bidang Tanah Terdaftar tahun } n} \times 100\% \right) / 3 \right\}$	Belum optimalnya fasilitasi pembebasan tanah

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air
	1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
	2. Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
	3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan
	4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai
	5. Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
	6. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya
	7. Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jaringan irigasi dan sumber daya air

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
	1. Sub Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan
	3. Sub Kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Terehabitasinya Jaringan Irigasi Permukaan
	4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan
1. Meningkatkan kondisi jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatkan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan
	2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	3. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi
	4. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan
	5. Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan	Terekonstruksinya Jalan
	6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala
	7. Sub Kegiatan Rehabilitasi jalan	Terehabitasinya Jalan
	8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin
	9. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan
	10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
3. Meningkatkan ketersediaan jembatan yang sesuai standar kabupaten	11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 12. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan 14. Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan Terbangunnya Jembatan Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala Jembatan yang mendapatkan Pelebaran
Meningkatkan—akses layanan air minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 5. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya akses masyarakat yang terlayani air minum layak Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
Meningkatkan akses layanan sarana sanitasi air limbah domestik	<p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman</p> <p>2. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</p> <p>3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</p> <p>4. Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja</p> <p>6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p> <p>7. Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat</p>	<p>Meningkatnya akses masyarakat yang terlayani sarana sanitasi air limbah domestik layak</p> <p>Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman</p> <p>Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</p> <p>Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</p> <p>Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja</p> <p>Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p> <p>Tersedianya Unit Pengolahan Setempat</p>

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
	8. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	9. Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Meningkatkan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan drainase perkotaan
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sarana Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
	3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan
	4. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan
	5. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
	6. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan
Meningkatkan layanan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan infrastruktur persampahan
	1. Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
	2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	4. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penataan bangunan dan lingkungannya
-	1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
-	2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
1. Meningkatkan pembangunan gedung pemerintah dan publik	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya pembangunan gedung pemerintah dan publik
2. Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala
	2. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
-	3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG
1. Meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	2. Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan
2. Meningkatkan layanan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen HSPK dan Harga satuan
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
1. Meningkatkan fasilitasi pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang 2. Meningkatkan fasilitasi pelayanan rekomendasi perijinan	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang
	1. Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman

Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (Output)
33	34	35
	2. Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman
Meningkatkan layanan pemanfaatan ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota
	1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota
	1. Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif
Meningkatkan fasilitasi pembebasan tanah	Kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah fasilitasi Penatagunaan tanah
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
luas areal sawah yang teraliri irigasi	luas areal sawah yang teraliri irigasi	DPUPR
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	
Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	
Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	
Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	
Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	
panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
panjang jalan kabupaten kondisi baik	panjang jalan kabupaten kondisi baik	
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	
Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	
Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	
Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	
Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jembatan yang Dibangun	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	
Panjang Jembatan yang Dilebarkan	Panjang Jembatan yang Dilebarkan	
Jumlah penduduk yang terlayani air minum	Jumlah penduduk yang terlayani air minum	
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	
Jumlah penduduk yang terlayani akses sanitasi layak	Jumlah Penduduk yang terlayani akses sanitasi layak	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	
Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	
Panjang drainase lingkungan yang dibangun / direhabilitasi	Panjang drainase lingkungan yang dibangun / direhabilitasi	
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	
Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	
Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan ditingkatkan	
Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	
Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	
Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	
Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	
Jumlah dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/ direhab	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/ direhab	
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	
Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih	
Jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan yang disediakan	Jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan yang disediakan	
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	
Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	
Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	

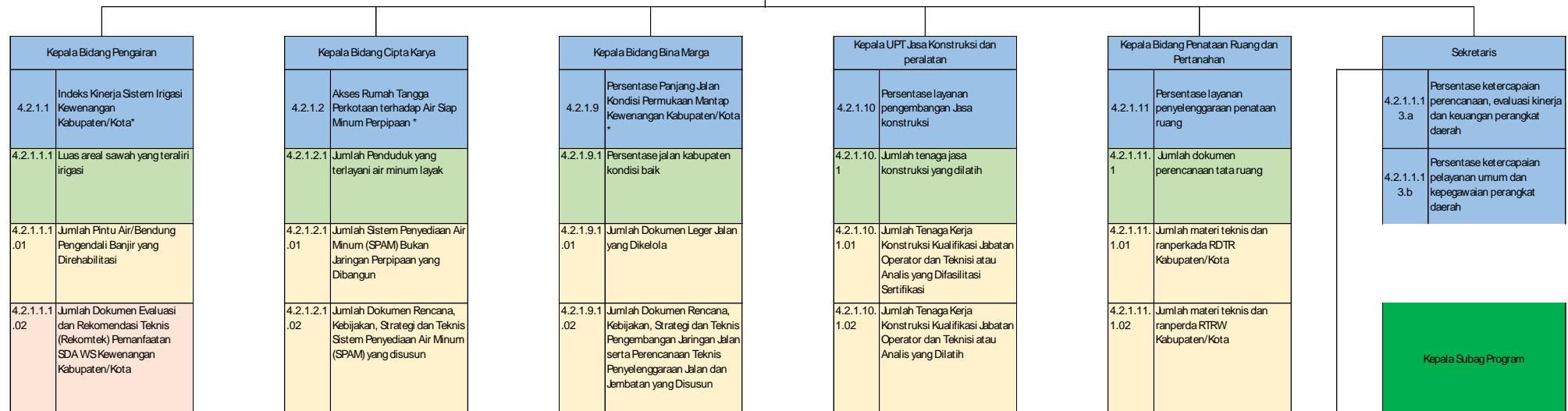
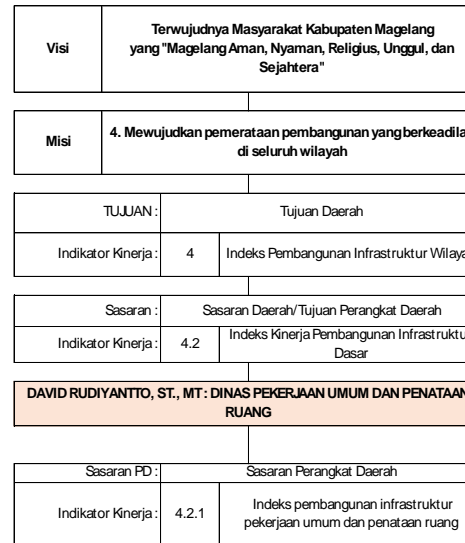
Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
36	37	38
Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	
jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	
Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota	
Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administrasi	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administrasi	
Jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang

DAVID RUDIYANTO, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

Lampiran 2 : Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG



4.2.1.1.1.03	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	4.2.1.2.1.03	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	4.2.1.9.1.03	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	4.2.1.10.2	Jumlah dokumen HSPK dan Harga satuan	4.2.1.11.2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4.2.1.1.1.3.a.1	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
4.2.1.1.1.04	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4.2.1.2.1.04	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	4.2.1.9.1.04	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	4.2.1.10.2.01	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4.2.1.11.2.01	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	4.2.1.1.1.3.a.1.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.2.1.1.1.05	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	4.2.1.2.1.05	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.2.1.9.1.05	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			4.2.1.11.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4.2.1.1.1.3.a.1.02	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.2.1.1.1.06	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.2.1.2.1.06	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	4.2.1.9.1.06	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			4.2.1.11.3.01	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administrasi	4.2.1.1.1.3.a.1.03	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.2.1.1.1.07	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA W/S Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4.2.1.3	Persentase infrastruktur persampahan kondisi baik	4.2.1.9.1.07	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			4.2.1.12	Persentase layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan	Kepala Subag Keuangan	
4.2.1.1.2	Panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	4.2.1.3.1	Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan ditingkatkan	4.2.1.9.1.08	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			4.2.1.12.1	Jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	4.2.1.1.1.3.a.2	Jumlah laporan keuangan yang disusun
4.2.1.1.2.01	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	4.2.1.3.01	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	4.2.1.9.1.09	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian			4.2.1.12.1.01	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.2.1.1.1.3.a.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.1.1.2.02	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4.2.1.3.02	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	4.2.1.9.1.10	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin					4.2.1.1.1.3.a.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.2.1.1.2.03	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.2.1.3.03	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	4.2.1.9.1.11	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi					4.2.1.1.1.3.a.2.03	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.2.1.1.2.04	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.2.1.3.04	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	4.2.1.9.1.12	Panjang Jembatan yang Dibangun					Kepala Subag Umum dan Kepegawaian	
		4.2.1.4	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	4.2.1.9.1.13	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala					4.2.1.1.1.3.b.1	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan
		4.2.1.4.1	Jumlah Penduduk yang terlayani akses sanitasi layak	4.2.1.9.1.14	Panjang Jembatan yang Dilebarkan					4.2.1.1.1.3.b.1.01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

4.2.1.4.1.01	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun
4.2.1.4.1.02	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
4.2.1.4.1.03	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
4.2.1.4.1.04	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun
4.2.1.4.1.05	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan
4.2.1.4.1.06	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4.2.1.4.1.07	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob
4.2.1.4.1.08	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
4.2.1.4.1.09	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
4.2.1.5	Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik
4.2.1.5.1	Panjang drainase perkotaan yang dibangun/direhabilitasi
4.2.1.5.1.01	Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
4.2.1.5.1.02	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan

4.2.1.1.1.3.b.2	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
4.2.1.1.1.3.b.2.01	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4.2.1.1.1.3.b.2.02	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
4.2.1.1.1.3.b.3	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
4.2.1.1.1.3.b.3.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.2.1.1.1.3.b.3.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.2.1.1.1.3.b.4	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
4.2.1.1.1.3.b.4.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
4.2.1.1.1.3.b.4.02	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
4.2.1.1.1.3.b.4.03	Jumlah Mebel yang Dipelihara
4.2.1.1.1.3.b.4.04	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4.2.1.1.1.3.b.4.05	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

4.2.1.5.1.03	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi
4.2.1.5.1.04	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun
4.2.1.5.1.05	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
4.2.1.5.1.06	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara
4.2.1.7	Persentase penataan bangunan gedung
4.2.1.7.1	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/direhabilitasi
4.2.1.7.1.01	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala
4.2.1.7.1.02	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
4.2.1.7.1.03	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG
4.2.1.8	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya
4.2.1.8.1	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan
4.2.1.8.1.01	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
4.2.1.8.1.02	Jumlah dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Catatan :

1. Kode diisi kode indikator kinerja yang telah disusun
2. Indikator diisi indikator kinerja sesuai dengan tingkatannya
3. Indikator kinerja diisi sesuai kewenangannya yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, apabila satu jabatan memiliki indikator yang berbeda level maka dapat dibedakan berdasarkan kode indikator
4. Apabila indikator kinerja pada level kegiatan diampu oleh lebih dari 1 (satu) eselon IV, maka indikator
5. Penataan bagan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah.

4.2.1.8.1 .03	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata
4.2.1.8.1 .04	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



DAVID RUDIYANTO, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005